

**ANALISIS PENGARUH INFRASTRUKTUR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DESA
(STUDI KASUS DI PEDESAAN PULAU MADURA)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh:

**Melati Puspa Anugrah
125020100111013**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

ANALISIS PENGARUH INFRASTRUKTUR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DESA (STUDI KASUS DI PEDESAAN PULAU MADURA)

Yang disusun oleh :

Nama : Melati Puspa Anugrah
NIM : 125020100111013
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Juli 2016

Malang, 25 Juli 2016
Dosen Pembimbing,

Dr. Moh. Khusaini, SE., M.Si., MA.
NIP. 19710111 199802 1 001

ANALISIS PENGARUH INFRASTRUKTUR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DESA (STUDI KASUS DI PEDESAAN PULAU MADURA)

Melati Puspa Anugrah, Dr. Moh. Khusaini, SE., M.Si., MA
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang
Email: melatipuspa4@gmail.com

ABSTRACT

Infrastructure have important role in economic development. It's not only serve the necessity of region's economic, but also stimulate new economic activities on certain region. Development of infrastructure can increase region's economic. The availability of proper infrastructure is inseparable from village government influence. Decentralization has made the concept that development should be directed at the lowest level in government structure i.e, village.

Village is autonomous region and gain privileges to manage finances, fund allocation village, village chief elections and development process. The objectives of this research is the availability of the infrastructure (roads, water supply, irrigation, electricity, health and education infrastructure) have an influence in the original revenue village (PADesa) using secondary data that obtained through 2014 and PODES survey and using logistic regression analysis.

The result of this research showed that the variable irrigation, electricity and health infrastructure showed significant positive results against PADesa. With the result, one of the efforts to improve the results of the PADesa can be done with increasing access to irrigation, electricity and health infrastructure.

Keywords : Rural, Disparity, Infrastructure, and PADesa

A. PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun terakhir menunjukkan hasil peningkatan yang baik. Tercatat bahwa presentase penduduk miskin di Jawa Timur terus menurun dari tahun 2009 hingga tahun 2014 berkurang sebesar 4,4%. Untuk PDRB ADHB maupun ADHK tahun 2010-2014 Prov. Jawa Timur juga mengalami peningkatan menurut tahun dasar 2000 dan 2010. PDRB ADHB digunakan untuk mengetahui pergeseran dan struktur ekonomi dan menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati seluruh penduduk di suatu daerah dan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tiap taun. Sedangkan PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Selain penduduk miskin yang terus menurun dan PDRB ADHB & ADHK yang mengalami peningkatan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Prov. Jawa Timur tahun 2006 hingga 2013 juga cenderung menurun sebesar 3,77% dari 7,72% pada tahun 2006 dan berkurang menjadi 4,02% pada tahun 2014.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur tidak dapat terlepas dari masalah disparitas dan ketimpangan. Hal ini membuat pusat perekonomian terjadi di satu titik saja. Pulau Madura merupakan kawasan yang terkena dampak dari disparitas dan ketimpangan karena letak geografis Pulau Madura yang terpisah dengan Pulau Jawa. Dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Pulau Madura yang berada di bawah Jawa Timur pada tahun 2004. Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,28 sedangkan untuk Kab. Bangkalan sebesar 4,71; Kab. Sampang sebesar 4,06; Kab. Pamekasan sebesar 3,86 dan Kab. Sumenep sebesar 5,28. Namun setelah dibangunnya infrastruktur berupa jembatan yang menghubungkan kota/kabupaten di Pulau Jawa Timur dan Pulau Madura, pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura berada di atas Jawa Timur pada tahun 2014. Jawa Timur memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 5,86 pada tahun 2014, sedangkan untuk Kab. Bangkalan sebesar 7,19; Kab. Pamekasan sebesar 5,86; Kab. Sumenep 6,5 dan Kab. Sampang hanya sebesar 0,07 karena pada 2014 sektor konstruksi di Kab.

Sampang mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga hal itu mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di Kab. Sampang.

Winoto dan Siregar (2006) menyebutkan bahwa ketersediaan infrastruktur dapat mempengaruhi peningkatan akses masyarakat terhadap sumberdaya yang ada sehingga meningkatkan produktivitas dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin besar investasi yang diberikan, maka dampak ekonomi yang timbul akan meningkat. Ketersediaan infrastruktur di pedesaan tidak terlepas dari peran pemerintah desa. Adanya era reformasi tahun 1998 menuntut adanya reformasi salah satunya adalah model pemerintahan yang berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakat di daerahnya dimana konsep pembangunan harus lebih diarahkan kepada pembangunan di tingkatan terendah di suatu struktur pemerintahan, yaitu desa. Desa adalah suatu kawasan yang otonom dan diberi hak-hak yang istimewa untuk mengelola keuangan, alokasi dana desa, pemilihan kepala desa dan proses pembangunan.

Ada beberapa sumber pendapatan desa yang salah satunya adalah Pendapatan Asli Desa (PADesa). Desa memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). BUMDES merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan memiliki badan hukum. Pemerintah desa dapat membuat BUMDES sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. BUMDES menjadi wadah pemerintah desa dan warganya yang secara proporsional melaksanakan program pemberdayaan perekonomian tingkat desa, keberadaan BUMDES juga dapat memberikan pengaruh pada peningkatan PADesa, apabila PADesa dapat meningkat maka akan didapatkan dana berlebih untuk pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut dan dapat berimbas pada naiknya kualitas hidup masyarakat desa. Prioritas utama BUMDes adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat desa seperti pasokan barang sembako, fasilitas pemenuhan hajat hidup seperti sarana air bersih, sarana komunikasi, dan mobilitas agar masyarakat desa memiliki aksesibilitas yang baik untuk interaksi dengan luar desa.

B. KAJIAN PUSTAKA

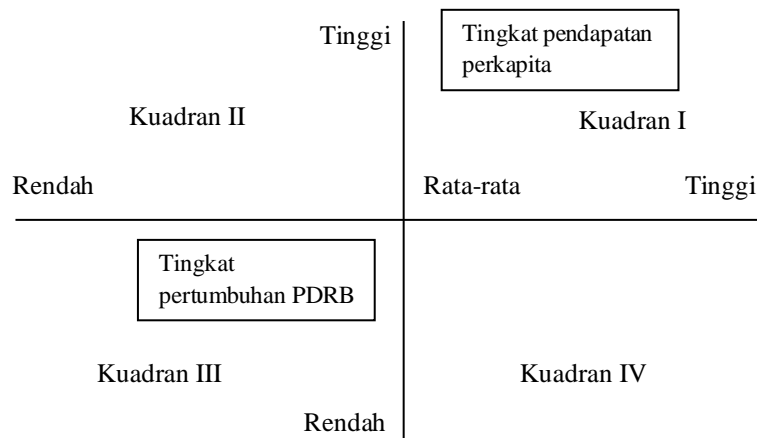
Teori Pertumbuhan Ekonomi

Produktivitas dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu modal fisik, modal manusia, sumberdaya alam dan pengetahuan teknologis. Menurut Case and Fair (2004) infrastruktur merupakan salah satu bagian dari modal fisik. Pertumbuhan ekonomi suatu negara salah satunya bergantung pada investasi komplementer negara dan sumberdaya manusia (pendidikan), infrastruktur dan pengembangan (Todaro dan Smith, 2006). Hal ini disimpulkan oleh Todaro dan Smith dengan menggunakan formulasi $Y=AK$ dimana Y adalah output, A adalah teknologi dan K adalah modal fisik. Dapat dikatakan bahwa infrastruktur dapat mempengaruhi output yang akan dihasilkan.

Wilayah

Ahli ekonomi wilayah, Okun dan Richardson menggunakan dua indikator yaitu tingkat kemakmuran yang diukur menggunakan pendapatan perkapita dan kemampuan berkembang suatu wilayah yang diukur berdasarkan tingkat PDRB pertahun. Selanjutnya setiap indikator tersebut dibedakan dalam dua tingkat yaitu tinggi dan rendah, dengan demikian terdapat empat macam kategori wilayah.

Gambar 1 : **Klasifikasi Wilayah Menurut Okun dan Richardson**



Sumber: Teori-teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah, 2013.

Menurut BPS Pulau Madura tergolong pada kuadran II, dan strategi pengembangan wilayah bagi wilayah yang ada di kuadran II yaitu salah satunya dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur secara cukup dan berkapasitas untuk menunjang pengembangan berbagai kegiatan sektoral, regional dan ekspor.

Otonomi Desa

Otonomi desa adalah kemandirian desa. Kalangan yang berhaluan lokalis dan romantis cenderung memahami bahwa kemandirian desa merupakan masalah internal desa, rumah tangga “sendiri”, yaitu kemampuan mengelola maupun membiayai pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan bertumpu pada hasil sumberdaya lokal, swadaya dan gotong royong masyarakat, atau yang sering disebut sebagai Pendapatan Asli Desa (PADesa). Apabila bantuan pemerintah lebih besar daripada PADesa, berarti otonomi desa gagal dilaksanakan dan desa bergantung pada pemerintah supradesa. Kelemahan mendasar konsepsi lokalis adalah bahwa otonomi desa lebih dipandang sebagai kewajiban dan tanggungjawab, bukan sebagai hak.

Keuangan Desa

Sumber pendapatan desa berasal dari :

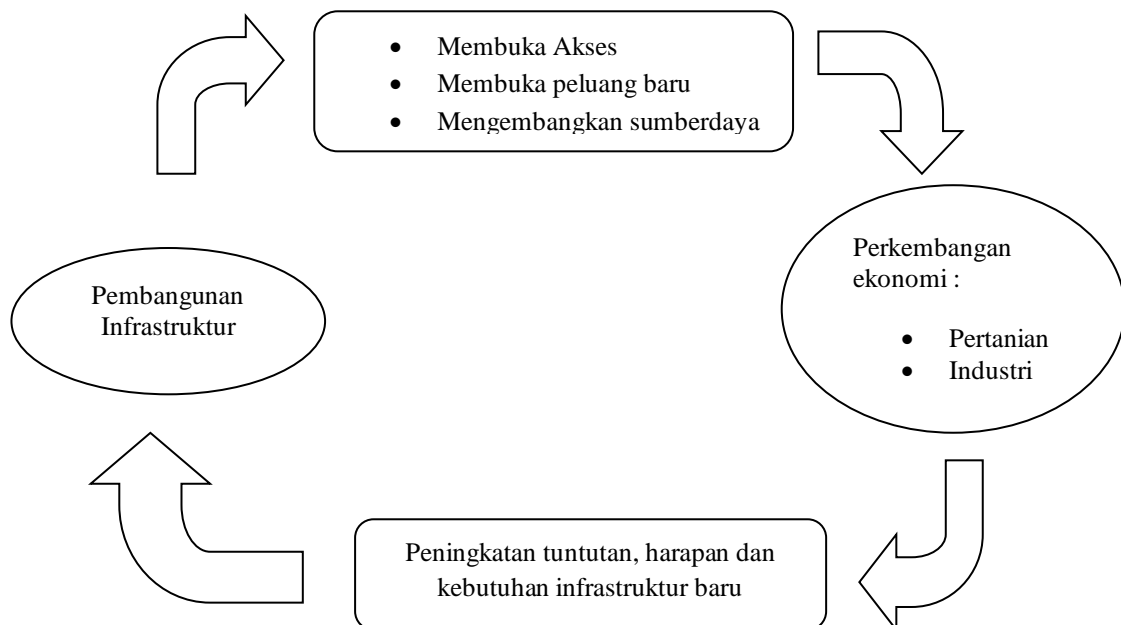
1. Pendapatan asli desa (PADesa) yang berasal dari :
 - a. Usaha desa.
Yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa yang meliputi usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha lain yang sejenis, Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa, Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis, Industri dan kerajinan rakyat. Yang tergolong “badan hukum” dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro pedesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa, dan sebagainya).
 - b. Hasil kekayaan desa.
Hasil kekayaan desa yang dimaksud meliputi Tanah kas desa, Pasar desa, Pasar hewan, Bangunan desa, Tambatan perahu, Obyek rekreasi/wisata yang diurus/dikelola desa. Tempat pemancingan/pemandian umum yang diurus/dikelola desa, Jalan desa; dan/atau, Lain-lain kekayaan milik desa. Lain-lain kekayaan milik desa” antara lain : barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah; barang yang berasal dari; perolehan

- lainnya dan/atau dari pihak ketiga; barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak dan lainlain sesuai dengan peraturan perundangan; hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; hibah dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan hasil kerjasama desa.
- c. Hasil swadaya dan partisipasi.
 - d. Hasil gotong royong.
 - e. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukkan bagi desa.
 3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang dibagi ke setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
 4. Alokasi Dana Desa (ADD)
 5. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
 6. Hibah
 7. Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat

Infrastruktur

Infrastruktur memiliki peran yang fundamental dalam pengembangan sebuah kegiatan ekonomi. Peran infrastruktur dalam kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu infrastruktur menstimulir munculnya kegiatan ekonomi dan infrastruktur mendukung berkembangnya suatu kegiatan ekonomi wilayah. . Di dalam peran yang pertama, peran infrastruktur berada di dalam posisi yang sangat fundamental dikarenakan sering berfungsi membuka aksesibilitas yang sebelumnya tidak ada, misalnya prasarana jalan, saluran komunikasi, jalur penerbangan dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam peran yang kedua, infrastruktur lebih berfungsi untuk lebih menyokong kegiatan ekonomi yang telah berlangsung selama ini.

Gambar 2 : Peran Infrastruktur dan Pengembangan Ekonomi



Sumber: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *ceoss section* yaitu data sekunder hasil survei Podes Tahun 2014. Populasi dalam penelitian ini adalah pedesaan yang berada di 4 kabupaten Pulau Madura dengan total 990 desa.

Metode penelitian yang digunakan adalah Regresi Logistik. Model regresi logistik yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel Dependen

β_0 = Konstanta

β_1 – β_6 = Koefisien Variabel

e = error

Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Goodness of Fit* (kelayakan model)
Untuk menguji kelayakan model menggunakan Hosmer-Lemeshow. Apabila hasil uji > derajat signifikansi (0,05) maka dapat dikatakan bahwa model sudah tepat untuk digunakan.
2. *Nagelkerke R Square* (koefisien determinasi)
Apabila nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan apabila nilai R^2 mendekati 1 berarti independen mampu memberikan hampir semua informasi yang diperlukan dalam memprediksi variabel dependen.
3. Signifikansi simultan
Kriteria pengujian menyatakan apabila nilai probabilitas < *level of significance* ($\alpha = 5\%$) maka terdapat pengaruh signifikan secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen.
4. Signifikansi parsial
Kriteria pengujian menyatakan apabila nilai probabilitas < *level of significance* ($\alpha = 5\%$) maka terdapat pengaruh signifikan secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen.

Variabel dependen dalam penelitian ini diperoleh dari data survei podes dengan menghitung rerata sleuruh pendapatan asli desa, dimana jika pendapatan asli desa di desa tersebut > rerata seluruh pendapatan asli desa maka variabel respon tersebut adalah 1 (di atas rata-rata) dan jika < rerata seluruh pendapatan asli desa maka 0 (di bawah rata-rata).

Variabel dependen dalam penelitian ini terdiri dari 6 infrastruktur fisik yang diperoleh dari survei podes tahun 2014 yaitu :

1. Jalan (X1)
Data kategorik 1 = aspal dan 0 = lainnya
2. Irigasi (X2)
Data kategorik 1 = ada dan 0 = tidak ada
3. Air bersih (X3)
Data kategorik 1 = layanan air bersih dan 0 = lainnya
4. Listrik (X4)
Data numerik, diperoleh dari hasil penjumlahan rumah tangga pengguna listrik dan non listrik di Pedesaan Pulau Madura

5. Prasarana Kesehatan (X5)
Data numerik, diperoleh dari hasil penjumlahan prasarana infrastruktur kesehatan yang ada di Pedesaan Pulau Madura
6. Pendidikan
Data numerik, diperoleh dari hasil penjumlahan jenjang pendidikan formal Negeri di Pedesaan Pulau Madura (SD, SMP, SMA).

D. HASIL PENELITIAN

Dalam pembuktian model dan hasil penelitian, peneliti menggunakan analisis regresi logistik dengan hasil variabel independen yaitu irigasi, listrik dan prasarana kesehatan signifikan terhadap variabel dependen yaitu PADesa.

Ketersediaan Infrastruktur di Pedesaan Pulau Madura

Ketersediaan infrastruktur di pedesaan Pulau Madura diolah dengan data yang di dapatkan dari survei PODES 2014 dengan jumlah 990 desa. Berikut adalah ketersediaan infrastruktur jalan, irigasi, air bersih, listrik, prasarana kesehatan dan pendidikan :

Tabel 1 : Jalan

Jalan	Frekuensi	%
Aspal	473	47.9%
Lainnya	514	52.1%

Sumber : Survei PODES 2014, data diolah

Pulau Madura pada tahun 2014 berupa jalan aspal dengan prosentase sebesar 47,9%, sedangkan wilayah di pedesaan Pulau Madura pada tahun 2014 yang memiliki jenis permukaan jalan dari sentra produksi atau lahan pertanian ke jalan utama desa berupa jenis permukaan lainnya memiliki prosentase sebesar 52,1%.

Tabel 2 : Irigasi

Keberadaan saluran irigasi	Frekuensi	%
Ada	259	26.2%
Tidak ada	728	73.8%

Sumber : Survei PODES 2014, data diolah

Sebagian besar wilayah pedesaan Pulau Madura pada tahun 2014 tidak memiliki saluran irigasi dengan prosentase sebesar 73.8%, sedangkan wilayah pedesaan Pulau Madura pada tahun 2014 yang memiliki saluran irigasimemiliki prosentase sebesar 26.2%.

Tabel 3 : Air bersih

Sumber air untuk minum	Frekuensi	%	Sumber air untuk mandi/cuci	Frekuensi	%
Air kemasan	25	2.5%	Air kemasan	53	5.4%
PDAM	68	6.9%	PDAM	9	0.9%
Ledeng tanpa meteran	11	1.1%	Ledeng tanpa meteran	159	16.1%

Sumur bor	151	15.3%	Sumur bor	692	70.1%
sumur	690	69.9%	sumur	51	5.2%
mata air	38	3.9%	mata air	20	2.0%
sungai/danau/kolam	0	0.0%	sungai/danau/kolam	3	0.3%
air hujan	4	0.4%	air hujan	0	0.0%
lainnya	0	0.0%	lainnya	0	0.0%

Sumber : Survei PODES 2014, data diolah

. Sebagian besar wilayah pedesaan Pulau Madura pada tahun 2014 menggunakan sumur sebagai sumber air untuk air minum dengan prosentase sebesar 69.9%, sedangkan wilayah pedesaan Pulau Madura pada tahun 2014 yang menggunakan sumur bor sebagai sumber air untuk air minum memiliki prosentase sebesar 15.3%. Kemudian wilayah pedesaan Pulau Madura pada tahun 2014 yang menggunakan PDAM sebagai sumber air untuk air minum memiliki prosentase sebesar 6.9%. Dan wilayah pedesaan Pulau Madura pada tahun 2014 yang menggunakan mata air sebagai sumber air untuk air minum memiliki prosentase sebesar 3.9%.

Sedangkan wilayah pedesaan Pulau Madura pada tahun 2014 yang menggunakan air kemasan sebagai sumber air untuk air minum memiliki prosentase sebesar 2.5% dan sebesar 1.1% wilayah pedesaan Pulau Madura pada tahun 2014 yang menggunakan ledeng tanpa meteran sebagai sumber air untuk air minum. Hanya 0.4% wilayah pedesaan Pulau Madura pada tahun 2014 yang menggunakan air hujan sebagai sumber air untuk air minum. Sedangkan tidak satupun wilayah pedesaan Pulau Madura pada tahun 2014 yang menggunakan sungai/danau dan yang lainnya sebagai sumber air untuk air minum.

Tabel 4 : Listrik

	Frekuensi	%
Keluarga pengguna PLN	1136932	93,80%
Keluarga pengguna non PLN	47397	3,91%
Keluarga tanpa listrik	27811	2,29%

Sumber : Survei PODES 2014, data diolah

Sebagian besar keluarga di wilayah pedesaan Pulau Madura pada tahun 2014 menggunakan PLN dengan prosentase 93,80%, sedangkan di wilayah pedesaan Pulau Madura pada tahun 2014 yang menggunakan non PLN memiliki prosentase sebesar 3,91%. Kemudian keluarga di wilayah pedesaan Pulau Madura pada tahun 2014 yang tanpa listrik memiliki prosentase sebesar 2,29%.

Tabel 5 : Prasarana kesehatan

Puskesmas	Frekuensi
Puskesmas dengan rawat inap	83
Puskesmas tanpa rawat inap	12

Sumber : Survei PODES 2014, data diolah

Jumlah puskesmas dengan rawat inap di wilayah pedesaan Pulau Madura pada tahun 2014 sebanyak 83 dan jumlah puskesmas tanpa rawat inap di wilayah pedesaan Pulau Madura pada tahun 2014 sebanyak 12.

Tabel 6 : Pendidikan

Jenjang pendidikan (Negri)	Frekuensi
SD	2214
SMP	195
SMA	51

Sumber : Survei PODES 2014, data diolah

Jumlah pendidikan pada tingkat SD di wilayah pedesaan Pulau Madura pada tahun 2014 sebanyak 2214, sedangkan jumlah pendidikan pada tingkat SMP di wilayah pedesaan Pulau Madura pada tahun 2014 sebanyak 195 dan jumlah pendidikan pada tingkat SMA di wilayah pedesaan Pulau Madura pada tahun 2014 sebanyak 51.

Analisis Regresi Logistik

Hosmer and Lameshow Test	0.479
Nagelkerke R Square	0.069
Omnibus Test	0.000

Independent Variables	B	Wald	Sig.	Odd Ratio
Jalan	0.146	1.131	0.288	1.158
Irigasi*	0.365	5.750	0.016	1.440
Air Bersih	0.795	0.693	0.405	2.215
Listrik*	0.001	21.707	0.000	1.001
Prasarana Kesehatan*	0.613	7.217	0.007	1.846
Pendidikan	-0.030	0.312	0.576	0.970
Constant	-2.820	2.148	0.143	0.060

*signifikan

Sumber : Survei PODES 2014, data diolah

Hasil uji Hosmer and Lameshow Test menunjukkan $> level\ of\ significance$ (0.05) sehingga dapat dinyatakan bahwa model yang terbentuk cocok dengan data observasinya, yaitu mampu atau layak digunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

Koefisien determinasi (Nagelkerke R^2) diperoleh sebesar 0.069 atau sebesar 6.9%. Hal ini berarti kontribusi pengaruh infrastruktur jalan, irigasi, air bersih, listrik, prasarana kesehatan dan pendidikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADesa) di wilayah pedesaan Pulau Madura sebesar 6.9%, sedangkan sisanya sebesar 93.1% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Omnibus Test menunjukkan hasil < 0.05 maka terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan infrastruktur jalan, irigasi, air bersih, listrik, prasarana kesehatan dan pendidikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADesa) di wilayah pedesaan Pulau Madura.

Variabel irigasi memiliki signifikansi sebesar $0.016 < 0.05$ sehingga irigasi signifikan terhadap PADesa. Variabel listrik memiliki signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ sehingga listrik signifikan terhadap PADesa. Variabel prasarana kesehatan memiliki signifikansi sebesar $0.007 < 0.05$ sehingga prasarana kesehatan signifikan terhadap PADesa.

E. DISKUSI

Jalan (X1)

Variabel jalan memiliki nilai *P Value* uji *wald* (signifikansi) 0.288 maka > 0.05 , sehingga dapat dikatakan bahwa jalan di Pedesaan Pulau Madura tidak berpengaruh signifikan terhadap PADesa. Hal ini diduga karena sebagian besar jenis permukaan jalan di pedesaan Pulau Madura masih belum aspal (tanah, diperkeras dan lainnya). Sehingga hal tersebut membuat pemerintah desa harus memperbaiki maupun membangun jalan beraspal dengan menggunakan dana alokasi dana desa. Alokasi dana desa diberikan kepada tiap desa mencapai 1 Miliar. Proyek pembangunan dan perbaikan jalan desa harus dibiayai sendiri oleh pemerintah desa atau dengan kata lain pemkab tidak lagi banyak terlibat dalam pembangunan dan perbaikan jalan pedesaan. Dengan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk membiayai perbaikan jalan, maka pendapatan desa akan berkurang.

Irigasi (X2)

Variabel irigasi memiliki nilai *P Value* uji *wald* (signifikansi) 0.016 maka < 0.05 , sehingga dapat dikatakan bahwa irigasi di Pedesaan Pulau Madura berpengaruh signifikan terhadap PADesa. Hal ini diduga karena saluran irigasi yang sudah ada di pedesaan Pulau Madura sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Meskipun hingga tahun 2014 jumlah irigasi yang tersedia di pedesaan Pulau Madura masih rendah yaitu 26.2% namun pemerintah terus melakukan program penyediaan air dengan pembangunan waduk dan embung untuk menambah debit air untuk kepentingan irigasi atau disebut dengan program *Quick Win*.

Air Bersih (X3)

Variabel air bersih memiliki nilai *P Value* uji *wald* (signifikansi) 0.405 maka > 0.05 , sehingga dapat dikatakan bahwa air bersih di Pedesaan Pulau Madura tidak berpengaruh signifikan terhadap PADesa. Hal ini diduga karena BUMDes di pedesaan pulau Madura belum mengelola dengan baik penyediaan air bersih untuk masyarakat desa. Sehingga pendapatan yang di dapatkan desa dari air bersih tidak dapat maksimal. Dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat pedesaan Pulau Madura yang menggunakan sumur maupun sumur bor untuk minum, mandi dan cuci.

Listrik (X4)

Variabel listrik memiliki nilai *P Value* uji *wald* (signifikansi) 0.000 maka < 0.05 , sehingga dapat dikatakan bahwa listrik di Pedesaan Pulau Madura berpengaruh signifikan terhadap PADesa. Hal ini diduga karena penyediaan listrik yang dilakukan oleh BUMDES sudah cukup maksimal, terlihat dari tingginya frekuensi jumlah keluarga yang menggunakan listrik. Dengan mengelola listrik yang maksimal untuk masyarakat desa, maka pendapatan yang didapat oleh BUMDES juga akan meningkat. BUMDES sendiri memberikan 10% dari laba bersih untuk desa dan hal tersebut akan menambah PADesa di pedesaan Pulau Madura.

Prasarana Kesehatan (X5)

Variabel prasarana kesehatan memiliki nilai *P Value* uji *wald* (signifikansi) 0.007 maka < 0.05 , sehingga dapat dikatakan bahwa prasarana kesehatan di Pedesaan Pulau Madura berpengaruh signifikan terhadap PADesa. Hal ini diduga karena prasarana kesehatan yang tersedia di pedesaan Pulau Madura sudah cukup untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat desa. Menurut WHO rasio ketersediaan puskesmas adalah 1 puskesmas untuk melayani 30.000 penduduk. Saat ini, di wilayah pedesaan Pulau Madura terdapat 95 puskesmas dengan jumlah puskesmas pada Kab. Bangkalan sebanyak 22 puskesmas, Kab. Sampang sebanyak 21 puskesmas, Kab. Pamekasan sebanyak 22 puskesmas dan Kab. Sumenep sebanyak 30 puskesmas. Apabila ketersediaan prasarana kesehatan maksimal, maka kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan akan terpenuhi dan hal tersebut juga akan mempengaruhi lama waktu sakit menjadi singkat. Semakin singkat lama waktu sakit, maka masyarakat tidak akan meninggalkan pekerjaan terlalu lama dan tidak akan menurunkan tingkat pendapatan desa.

Pendidikan (X6)

Variabel pendidikan memiliki nilai *P Value* uji *wald* (signifikansi) 0.576 maka > 0.05 , sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan di Pedesaan Pulau Madura tidak berpengaruh signifikan terhadap PADesa. Hal ini diduga meskipun infrastruktur pendidikan (SD, SMP dan SMA) di pedesaan Pulau Madura sudah cukup baik, namun bagi masyarakat desa pendidikan informal dirasa lebih perlu daripada pendidikan formal. Dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah masyarakat desa Pulau Madura yang lebih rendah dari rata-rata lama sekolah di Jawa Timur.

F. PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada pedesaan Pulau Madura sebagian besar telah menggunakan aspal sebagai lapisan jalan, namun ketersediaan saluran irigasi masih sangat minim. Untuk air bersih masih banyak masyarakat pedesaan Pulau Madura yang menggunakan sumur maupun sumur bor untuk minum, mandi maupun cuci. Ketersediaan listrik di pedesaan Pulau Madura sudah cukup baik dilihat dari jumlah pengguna listrik PLN yang cukup tinggi. Jumlah prasarana kesehatan cukup banyak, ada 95 puskesmas yang berada di setiap desa di pedesaan Pulau Madura. Sedangkan untuk prasarana pendidikan, jenjang sekolah dasar (SD) memiliki jumlah yang tinggi dibandingkan dengan sekolah menengah pertama (SMP) maupun sekolah menengah atas (SMA).
2. Variabel irigasi, listrik dan prasarana kesehatan berpengaruh signifikan positif terhadap PADesa di pedesaan Pulau Madura. Sehingga peningkatan akses terhadap ketiga infrastruktur tersebut dapat meningkatkan peluang Pulau Madura untuk mendapatkan PADesa yang lebih tinggi.
3. Variabel jalan, air bersih dan pendidikan tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap PADesa di pedesaan Pulau Madura.

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta kesimpulan pada penelitian ini, adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu :

1. Secara keseluruhan infrastruktur di pedesaan Pulau Madura sudah tersedia dan berfungsi dengan baik. Namun masih perlu dilakukan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur. Untuk mempermudah akses ekonomi, jalan di pedesaan Pulau Madura masih banyak yang perlu di aspal. Pembangunan saluran irigasi juga perlu ditingkatkan mengingat sebagian besar masyarakat desa Pulau Madura bekerja dalam sektor pertanian. Untuk prasarana pendidikan, jumlah prasarana pendidikan untuk jenjang SD, SMP dan SMA terlalu timpang. Pemerintah perlu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait agar jumlah prasarana pendidikan untuk

- jenjang SD, SMP dan SMA dapat seimbang sehingga masyarakat dapat menempuh di semua jenjang pendidikan.
2. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 pembangunan desa dapat diraih dengan peningkatan akses dan kualitas terhadap infrastruktur :
 - a. Pasal 1 ayat 8
Pembangunan desa adalah upaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
 - b. Pasal 4
 - (f) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
 - (h) Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
 - (i) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Teori-teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anonym. 2005. Jawa dan Madura Krisis Air Bersih. Media Indonesia. <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F24385/Jawa%20dan%20Madura%20Krisis%20Air%20Bersih-MI.htm> diakses 04 Januari 2015.
- Anonym. 2015. Tingkatkan Infrastruktur PLN di Madura. <http://kanalsatu.com/id/post/44555/tingkatkan-infrastruktur-pln-di-madura> diakses 04 Januari 2015.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan BAPPEPROV Jawa Timur. 2005. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Se Jawa Timur 2000-2004.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan BAPPEPROV Jawa Timur. 2015. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha 2010-2014.
- Bappenas. 2014. Perkembangan Pembangunan Provinsi Jawa Timur 2014. <http://simreg.bappenas.go.id/document/Publikasi/DokPub/05.%20Anprov%20Jawa%20Timur.pdf> diakses pada 3 Oktober 2015.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2013. Kesehatan. <http://jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/309>. Diakses pada 3 Juni 2016.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa timur. 2014. Pendidikan. <http://jatim.bps.go.id/Subjek/view/id/28#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1>. Diakses pada tanggal 6 Juni 2016 .
- Becker, Gary S. 1993. *Human Capital*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Behrman, J., Wolfe, B.,1987. How does Mother's Schooling Affect Family Health, Nutrition, Medical Care Usage and Household Sanitation?. *Journal of Econometrics* 36, 185-204.
- Bridge, Brandon A., Dadhi Adhikari, Matias Fontenla. 2014. Electricity, Income, And Quality Of Life. *The Social Science Journal*. Vol.53: 33-39.
- Budiarto, Wasis dan Rastrini. 2013. The Comparison Of Jamkesmas and Jamkesda Programme Implementation in Three Districts/Municipalities in East Java. *Buletin Penelitian dan Sistem Kesehatan*. Vol 16 (194-202).
- Calderon, Cesar dan Serven, Luis. 2004. The Effect Of Infrastructure Development On Growth and Income Distribution. *Working Papers Of The Central Bank Of Chile*.

- Carapetis, S., L. Beenhakker, and J.D.F. Howe. 1984. Supply and Quality of Rural Transportation Services in Developing Countries: A Comparative Review. *Working Paper 654*. Washington D.C: World Bank.
- Case, Karl E, Fair, C Ray. 2004. *Prinsip-prinsip Ekonomi Makro (Bambang Sarwiji)*. Jakarta: Indeks Kel Gramedia.
- Cooper, R. Donald dan Emory, C. Wiliam. 1996. *Metode Pendekatan Bisnis*. Terjemahan Ellen Gunawan dan Iman Nurmawan. Jakarta: Erlangga.
- Effendi, Mohammad dan R. Mulyo Hendarto. 2014. Dampak Pembangunan Jembatan Suramadu Terhadap Perekonomian Pulau Madura (Studi Kasus Kabupaten Bangkalan). *Diponegoro Journal Of Economics*. Vol.3 No.1: 1-13.
- Egert, Balazs, Kozluk, Tomasz J. and Douglas Sutherland. 2009. Infrastructure And Growth: Empirical Evidence. *William Davidson Institute Working Paper No. 957*.
- Egon E. Bergel dalam Rahardjo. 1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Sosiologi Pertanian*. Yogyakarta: UGM Press.
- Fan, S., Hazell, P., & Thorat, S. 1999. Government spending, agricultural growth and poverty: An analysis of inter-linkages in rural India. *IFPRI Research Report No. 110*. Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute.
- Fan, S., Zhang, L., & Zhang, X. 2002. Growth, inequality, and poverty in rural China: The role of public investments. *IFPRI Research Report No. 125*. Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute.
- Guritno, Mangkoesebroto. 1995. *Ekonomi Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE
- Hendratno. 2009. *Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Howes, Rodney, and Herbert Robinson. 2005. *Infrastructure for the Built Environment: Global Procurement Strategies*. London: Elsevier Ltd.
- Hia, Yasifati. 2005. Analisis Karakteristik Nelayan Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Di Kabupaten Nias (Studi Kasus Desa Fowa Kabupaten Nias). Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Yogyakarta: UII Press.
- Jalan, J., Ravallion, M., 2002. Does Piped Water Reduce Diarrhea for Children in Rural India?. *Journal of Econometrics*, forthcoming.
- Jochimsen, Reimut. 1996. *Theorie der Infrastruktur. Grundlagen Der Marktwirtschaftlichen Entwicklung*. Tübingen: Mohr.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT.Gramedia
- Lavy, V., Strauss, J., Thomas, D., deVreyer, P., 1996. Quality of Health Care, Survival and Health Outcomes in Ghana. *Journal of Health Economics* 15, 333-57
- Lee, L., Rosenzweig, M. and Pitt, M., 1997. The Effects of Improved Nutrition, Sanitation, and Water Quality on Child Health in High-Mortality Populations. *Journal of Econometrics* 77, 209-35

- Leipziger, D., Fay, M., Wodon, Q. and Yepes, T., 2003. Achieving the Millennium Development Goals: The Role of Infrastructure. *The World Bank Policy Research Working Paper* 3163.
- Liu, Yanchun. 2008. Impacts of Telecommunications Infrastructure And Its Spillover Effects On Regional Economic Growth In China. *Dissertation: George Mason University. Fairfax, VA.*
- Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. *Ekonomi publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Mankiw, N Gregory. 1997. *Pengantar Ekonomi (Jilid II) (Imam Nurmawan)*. Jakarta: Erlangga.
- Mayaningsih, Novi, Oki Hermansyah dan Myrnawati Savitri. 2014. Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Vol.17, No.1.*
- Masud, J., Sharan, D., & Lohani, B. N. 2007. *Energy for all: Addressing the energy, environment, and poverty nexus in Asia*. Manila: Asian Development Bank.
- Mopangga, Herwin. 2010. Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan di Provinsi Gorontalo, Tesis: Institut Pertanian Bogor, Sekolah Pascasarjana.
- Miller, J.B. 2000. *Principles and practice of public and private infrastructure delivery*. Kluwer Academic Publications 2000.
- M2 Communications Ltd. 2001. *World Bank: Georgia – World Bank Program To Improve Irrigation And Drainage Infrastructure*.
- Nasir, Mohammad. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pambudi, Himawan S., Erry Syahrian, Yanuardi, Syamsudin, Siti Fikriyah, Dadang Juliantara & Agung Wibawanto. 2003. *Politik Pemberdayaan*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Paul H. Landis. 1948. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pradhan, Rudra Prakash. 2010. Transport Infrastructure, Energi Consumption And Economic Growth Triangle In India: Cointegration And Causality Analysis. *Journal of Sustainable development. Vol.3, No.2.*
- Pradhan, Rudra P & Tapan P. Bagchi. 2013. Effect Of Transportation Infrastructure On Economic Growth In India: The VECM Approach. *Research In Transportation Economics Vol.38: 139-148.*
- Rozaki, A., Anang Sabtoni, Arie Sujito, Hesti Rinandari, Joko Purnomo, Muslichah Setiasih, Sunaji Zamroni, Sutoro Eko, Titok Hariyanto. 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE PRESS.
- Sagar, A. D. 2005. Alleviating energy poverty for the world's poor. *Energy Policy* 33: 1367–1372.
- Sunyoto, Usman. 2010. *Infrastruktur, Transportasi dan Pertahanan Sebagai Penggerak Utama. Kementerian Pendidikan Nasional*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional.

- Sukuryadi. 2011. Pengaruh Pembangunan Saluran Irigasi Terhadap Pendapatan Petani Pada Usaha Padi Sawah Di Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011. *Jurnal Media Bina Ilmiah Mataram*. Vol.5 No.8.
- Todaro, P Michael, Smith C Stephen. 2007. *Pembangunan Ekonomi di Negara Dunia Ketiga (Edisi Kesembilan Jilid 1)* (Haris Munanda, Puji A. L) Jakarta: Erlangga.
- Wikipedia. Pulau Madura. https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Madura diakses pada 16 Mei 2016.
- Williamson, J. G. 1965. Regional Inequality and Process of National Development: Description of the Pattern. *Chicago Journal*, Vol.13, No.4, Part 2, 1-84.
- Winoto, Joyo dan Siregar, Hermanto. 2006. Peranan Pembangunan Infrastruktur Dalam Menggerakkan Sektor Rill. *Jurnal Ekonomi Indonesia*. No 1.
- World Health Organization. 2002. *Water-related diseases related to drinking contaminated water and to the lack of safe water and sanitation for the household hygiene are among the main causes of child mortality.*